



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPTD KPHP DHARMASRAYA**  
**Jl. Lintas Sumatera km. 4 Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA UNIT VIII**  
**Nomor : 522/32/KPHP-DH/II-2019**

**TENTANG**  
**PENYIAPAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN,**  
**HUTAN NAGARI, HUTAN TANAMAN RAKYAT DAN KEMITRAAN KEHUTANAN PADA**  
**WILAYAH KPHP DHARMASRAYA TAHUN 2019**

- Menimbang : KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA UNIT VIII,
- a. bahwa penyelenggaraan kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada Wilayah KPHP Dharmasraya perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/ MenLHK-II/2016 tentang Perhutanan Sosial.
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada Wilayah KPHP Dharmasraya Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.179.019


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Melaksanakan Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada Wilayah KPHP Dharmasraya Tahun 2019.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata waktu dan Juklak/Juknis Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada Wilayah KPHP Dharmasraya diatur lebih lanjut dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada Wilayah KPHP Dharmasraya Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.179.019

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Dareh  
Pada Tanggal 18 Februari 2019.

KEPALA UPTD KPH DHARMASRAYA UNIT VIII,



**Drs. NOFDINAL YEFRI, M.Si**  
NIP. 19621110 199101 1 005

Tebusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera di Padang.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPTD KPHP DHARMASRAYA**  
**Jl. Lintas Sumatera km. 4 Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya**

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kasubag TU, Kepala Seksi PKSDAEPM, Kepala Seksi PPH, Kepala Resort, Dan  
S Satgas Polhut dan Anggota, Penyuluh Kehutanan, Staf KPHP Dharmasraya  
Dari : Kepala UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII  
Tanggal : 18 Februari 2019  
Nomor : 522/40/KPHP-DH/II-2019  
Perihal : Undangan Rapat Persiapan Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan  
Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman  
Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada Wilayah KPHP Dharmasraya Tahun  
2019

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada Wilayah KPHP Dharmasraya sesuai dengan DPA Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari/tanggal : Rabu / 27 Februari 2019  
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai  
Agenda : Rapat Persiapan kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada Wilayah KPHP Dharmasraya  
Tempat : UPTD KPHP Dharmasraya

Demikian kami sampaikan kepada Saudara untuk dapat dihadiri, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA UNIT VIII,



**Drs. NOFDINAL YEFRI, M.Si**

NIP. 19621110 199101 1 005

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DINAS KEHUTANAN**

**UPTD KPHP DHARMASRYA**

**Jl. Lintas Sumatera Sungai Dareh, Kabupaten**

**Dharmasraya**



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN**

**PENYIAPAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HKM, HN, HTR DAN**

**KEMITRAAN KEHUTANAN**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

SKPD	:	Dinas Kehutanan
Unit Eselon III	:	KPHP Dharmasrya
Unit Eselon IV	:	Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
Program	:	Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Hasil (Outcome)	:	Meningkatnya luasan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
Kegiatan	:	Penyiapan, pembinaan dan pengembangan HKM/HN/HTR dan Kemitraan Kehutanan
Indikator Kegiatan	:	- Meningkatkan jumlah usulan HKM/HN/HTR dan Kemitraan Kehutanan - Meningkatkan jumlah usulan HKM/HN/HTR dan Kemitraan Kehutanan yang diverifikasi - Meningkatkan jumlah perizinan HKM/HN/HTR dan Kemitraan Kehutanan.
Keluaran (output)	:	Meningkatnya Kelompok/Lembaga masyarakat yang mengelola Hutan (HKM,HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan).
Volume	:	2 (dua) Kelompok/Lembaga

### **I. LATAR BELAKANG**

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/ MenLHK-II/2016 tentang Perhutanan Sosial;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor XXXX tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor XX Tahun XXXX tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

## **B. Gambaran Umum**

Pembangunan hutan dan kehutanan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan secara arif dan bijaksana. Hutan sebagai sumber daya alam memiliki manfaat yang dapat mendorong perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat disekitarnya. Namun dengan kemajuan pembangunan sosial ekonomi masyarakat di segala bidang pembangunan telah menyebabkan tekanan sosial ekonomi tersendiri terhadap keberadaan kawasan hutan. Tekanan tersebut cenderung berlebihan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan hutan yang dapat menurunkan produktifitas lahan hutan tentunya dapat mengakibatkan terganggunya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Kebutuhan masyarakat akan hasil hutan mengalami peningkatan sejalan dengan penambahan penduduk dan kemajuan industri berbasis kehutanan. Akibat dinamika sosial ekonomi dalam pembangunan hutan, terjadi friksi antara masyarakat dan Negara dalam hal penguasaan lahan hutan. Masyarakat merasa selama ini akses sosial ekonomi mereka terhadap lahan hutan dibatasi oleh kepentingan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, izin pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dapat diberikan kepada masyarakat setempat, baik secara individu maupun kelompok dalam rangka memberikan akses

pemanfaatan hutan yang lebih luas pada masyarakat setempat untuk peningkatan kesejahteraan yang lebih nyata.

Untuk itu, dalam rangka pemulihan struktur dan fungsi ekosistem hutan melalui pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan hutan guna memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang, maka UPTD KPHP Dharmasraya tengah gencar mendorong Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan.

Pengembangan HKm/HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan adalah salah satu kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui pemberian akses yang lebih luas terhadap pemanfaatan hutan. Agar pelaksanaan pengembangan HKm/HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan dapat berjalan dengan lancar maka perlu dilakukan kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm/HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan dimana kegiatan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

### **C. Penerima Manfaat**

Penerima Manfaat dari kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan adalah :

1. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan Hutan (Hutan Lindung, dan Hutan Produksi).
2. Kelompok Masyarakat maupun Lembaga yang sedang dalam proses pengusulan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan maupun yang sudah memperoleh perizinan skema tersebut.

## **II. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan dilakukan melalui metode yaitu :

- Wawancara tidak terstruktur dengan masyarakat dan tokoh-tokoh kunci didalam masyarakat, perangkat nagari dan Lembaga Nagari terkait.



- Pertemuan/FGD bersama Kelompok Masyarakat maupun Lembaga Pengelola Hutan Nagari.
- Kunjungan/Pemeriksaan lapangan.

## 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan dilaksanakan dalam beberapa tahap tergantung pada proses yang sedang berjalan pada lokasi/nagari tempat pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

### 1. Penyiapan alat dan pengadaan bahan

Penyiapan Alat dan Pengadaan Bahan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang berupa alat tulis, alat transportasi, dokumentasi (surat-surat dan peraturan terkait) dll, sedangkan bahan berupa bahan habis pakai seperti Bahan Bakar Minyak.

### 2. Pelaksanaan yang meliputi :

- Fasilitasi Penyiapan Usulan : proses ini dilakukan pada unit pengelola mulai dari sosialisasi tingkat tapak dimana masyarakat diberikan pemahaman terkait skema perhutanan sosial dan adanya kesepakatan antara masyarakat memilih skema perhutanan sosial yang akan diusulkan sehingga diperoleh dokumen pengusulan perhutanan sosial.
- Fasilitas Penyusunan Rencana Pengelolaan/kerja : proses ini dilakukan untuk tahap penyusunan rencana kerja sesuai potensi yang dimiliki kelompok/lembaga.
- Pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan : proses ini dilakukan pada unit pengelola mulai dari melakukan pembinaan dan bimbingan terkait kendala-kendala yang dialami kelompok/lembaga.

### 3. Pelaporan

Penyusunan laporan akhir dilakukan setelah kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan dilaksanakan.

### III. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Tata waktu untuk mencapai keluaran dari kegiatan tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian Kegiatan Kegiatan	Tahun 2019											
	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Alat Tulis Kantor												
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas												
Belanja Pengandaan												
Belanja Makan dan minum rapat												
Belanja Makan dan minum kegiatan												
Perjalanan dinas dalam daerah												
Perjalanan dinas luar daerah												

### IV. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja Komponen Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 32.540.000 (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah),- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

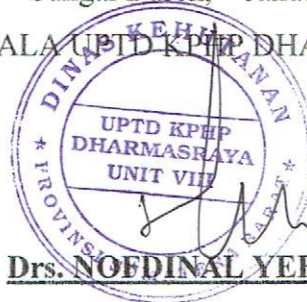
Sub Komponen	Uraian	Anggaran
Belanja bahan pakai habis	- ATK	463.000
	- BBM	2.987.000
Belanja Jasa Kantor	- Belanja jasa buruh/tukang/mandor	1.000.000
	- Belanja jasa pembuatan peta	480.000
Belanja cetak dan pengandaan	- Pengandaan	1.482.000

Belanja makan dan minum	- Belanja makan dan minuman rapat	640.000
	- Belanja makan dan minuman kegiatan	4.600.000
Belanja Perjalanan Dinas	- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.460.000
	- Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.908.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan ini dibuat agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sungai Dareh, Januari 2019

KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA



Drs. NOEDINAL YEFRI, M.Si

NIP. 196211101991031005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD			Formulir	
	2.00.04.2.00.04.01.179.019.5.2.			DPA-SKPD 2.2.1	
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019					
Urusan Pemerintahan	: 2.00.04. - KEHUTANAN				
Organisasi	: 2.00.04.01. - DINAS KEHUTANAN				
Program	: 2.00.04.2.00.04.01.179. - Perhutanan Sosial dan Kemitraan				
Kegiatan	: 2.00.04.2.00.04.01.179.019. - Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Dharmasraya				
Waktu Pelaksanaan	: 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Dharmasraya,				
Sumber Dana	: DBH,				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	[1] Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat		[1] 14,86 %		
Masukan	Tersedianya Dana		Rp 32.540.000,00		
Keluaran	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya		2 Kelompok		
Hasil	Luas izin pengelolaan hutan oleh kelompok/ masyarakat		100 Ha		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok tani					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				32.540.000,00
5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				32.540.000,00
5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				3.450.000,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				463.000,00
	<i>kertas A4</i>	2,00	rim	49.000,00	98.000,00
	<i>kertas F4</i>	5,00	rim	51.000,00	255.000,00
	<i>tinta refill</i>	3,00	kotak	35.000,00	105.000,00
	<i>kertas peraga</i>	10,00	lembar	500,00	5.000,00
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				2.987.000,00
	- <i>BBM perjalanan dinas</i>	1,00	Tahun	1.067.000,00	1.067.000,00
	- <i>BBM perjalanan*</i>	1,00	Kali	1.920.000,00	1.920.000,00
5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				1.482.000,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				1.482.000,00
	<i>fotocopy</i>	4.988,00	Lembar	250,00	1.247.000,00
	<i>penggandaan peta usulan areal kerja digital</i>	2,00	lembar	100.000,00	200.000,00
	<i>jilid laporan akhir tahun</i>	2,00	Buku	17.500,00	35.000,00
5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				5.240.000,00
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat				640.000,00
	- <i>Makan</i>	10,00	Kotak	28.000,00	280.000,00
	- <i>Snack</i>	20,00	Kotak	18.000,00	360.000,00
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				4.600.000,00
	- <i>makan dan minum pertemuan dengan kelompok tani/nagari di KPH dalam rangka fasilitasi penyiapan usulan, fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan/kerja, pembinaan dan bimbingan teknis HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan</i>	200,00	bungkus	23.000,00	4.600.000,00
5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				22.368.000,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				13.460.000,00
	<i>Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan pengendalian HKM, HN, HTR dan HR kemitraan</i>				1.290.000,00
	<i>Uang Harian</i>				1.290.000,00
	- <i>Eselon III (1 orang/1 hari/1 kali)</i>	1,00	OH	250.000,00	250.000,00
	- <i>Eselon IV (2 orang/1 kali/1 kali)</i>	2,00	OH	250.000,00	500.000,00
	- <i>Staf gol III (2 orang/1 hari/1 kali)</i>	2,00	OH	180.000,00	360.000,00
	- <i>Staf gol III/1 (1 orang/1 hari/1 kali)</i>	1,00	OH	180.000,00	180.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.0001.	Perjalanan dinas dalam rangka fasilitasi penyiapan usulan HKm, HN, HTR dan HR kemitraan		-		1.470.000,00
	Uang Harian		-		1.470.000,00
	- Eselon III (1 orang/1 hari/1 kali)	1.00	OH	250.000,00	250.000,00
	- Eselon IV (2 orang/1 hari/1 kali)	2.00	OH	250.000,00	500.000,00
	- Staf gol III (2 orang/1 hari/1 kali)	2.00	OH	180.000,00	360.000,00
	- Staf gol III/II (2 orang/1 hari/1 kali)	2.00	OH	180.000,00	360.000,00
	Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan/karja HKm, HN, HTR dan HR kemitraan		-		1.470.000,00
	Uang Harian		-		1.470.000,00
	- Eselon III (1 orang/1 hari/1 kali)	1.00	OH	250.000,00	250.000,00
	- Eselon IV (2 orang/1 hari/1 kali)	2.00	OH	250.000,00	500.000,00
	- Staf gol III/II (4 orang/1 hari/1 kali)	4.00	OH	180.000,00	720.000,00
	Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha HKm, HN, HTR dan HR kemitraan		-		1.470.000,00
	Uang harian		-		1.470.000,00
	- Eselon III (1 orang/1 hari/1 kali)	1.00	OH	250.000,00	250.000,00
	- Eselon IV (2 orang/1 hari/1 kali)	2.00	OH	250.000,00	500.000,00
	- Staf gol III/II (4 orang/1 hari/1 kali)	4.00	OH	180.000,00	720.000,00
	Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke dishut padang		-		7.760.000,00
	Uang Harian		-		5.160.000,00
	- Eselon III/IV (3 orang/2 hari/1 kali)	6.00	OH	500.000,00	3.000.000,00
	- Staf gol III/II (3 orang/2 hari/1 kali)	6.00	OH	360.000,00	2.160.000,00
	Uang Penginapan		-		2.600.000,00
	- Eselon III/IV (3 orang/1 hari/1 kali)	3.00	OH	600.000,00	1.800.000,00
	- Staf gol III/II (2 orang/1 hari/1 kali)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		-		8.908.000,00
	Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengembangan perhutanan sosial ke KLHK		-		8.908.000,00
	Uang Harian		-		2.700.000,00
	- Eselon III/IV/staf gol IV (1 orang/3 hari/1 kali)	3.00	OH	900.000,00	2.700.000,00
	Uang penginapan		-		1.984.000,00
	- Eselon III/IV dan staf gol IV (1 org/2 hari /1 kali)	2.00	OH	992.000,00	1.984.000,00
	Transportasi		-		4.224.000,00
	-Tiket pesawat	1.00	OT	2.952.000,00	2.952.000,00
	-Taksi sumbar	2.00	OT	380.000,00	760.000,00
	-Taksi DKI Jakarta	2.00	OT	256.000,00	512.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>32.540.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	8.458.001,00			
Triwulan II	Rp.	15.746.501,00			
Triwulan III	Rp.	3.262.667,00			
Triwulan IV	Rp.	5.072.831,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>32.540.000,00</b>			
			Padang, 28 Januari 2019		
			Mengesahkan,		
			<b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>		
			<b>ZAENUDDIN, SE.MM</b>		
			Pembina Utama Madya		
			NIP. 19621025 198503 1 002		

## NOTULEN

### RAPAT PERSIAPAN KEGIATAN PENYIAPAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN NAGARI, HUTAN TANAMAN RAKYAT DAN KEMITRAAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KPHP DHARMASRAYA TAHUN 2019

Hari / Tanggal : Rabu / 27 Februari 2019  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : UPTD KPHP Dharmasraya  
Pimpinan : Kepala UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII  
Agenda : Rapat Persiapan Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada Wilayah KPHP Dharmasraya Tahun 2019

Peserta Rapat :

1. Kepala UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII
2. Kasubag TU, Kepala Seksi PKSDAEPM, Kepala Seksi PPH
3. Penyuluh Kehutanan
4. Staf KPHP Dharmasraya

#### NOTULENSI :

1. Pembukaan dan arahan oleh Kepala UPTD KPHP Dharmasraya
  - APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Tahun 2019 telah disahkan, salah satu kegiatan pada KPHP Dharmasraya adalah Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada Wilayah KPHP Dharmasraya.
  - Keluaran dalam kegiatan ini adalah Meningkatnya Kelompok/Lembaga masyarakat yang mengelola Hutan (HKM,HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan) sebanyak 2 kelompok.
  - Kegiatan Meningkatnya Kelompok/Lembaga masyarakat yang mengelola Hutan (HKM,HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan) Tahun 2019 harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku.

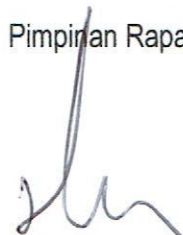
## 2. Hasil Notulensi

- Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan dilakukan melalui metode yaitu :
  - Wawancara tidak terstruktur dengan masyarakat dan tokoh-tokoh kunci didalam masyarakat, perangkat nagari dan Lembaga Nagari terkait.
  - Pertemuan/FGD bersama Kelompok Masyarakat maupun Lembaga Pengelola Hutan Nagari.
  - Kunjungan/Pemeriksaan lapangan.
- Fasilitasi Penyiapan Usulan : proses ini dilakukan pada unit pengelola mulai dari sosialisasi tingkat tapak dimana masyarakat diberikan pemahaman terkait skema perhutanan sosial dan adanya kesepakatan antara masyarakat memilih skema perhutanan sosial yang akan diusulkan sehingga diperoleh dokumen pengusulan perhutanan sosial.
- Fasilitas Penyusunan Rencana Pengelolaan/kerja : proses ini dilakukan untuk tahap penyusunan rencana kerja sesuai potensi yang dimiliki kelompok/lembaga.
- Pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan : proses ini dilakukan pada unit pengelola mulai dari melakukan pembinaan dan bimbingan terkait kendala-kendala yang dialami kelompok/lembaga.

Demikian Notulen Rapat Persiapan Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada Wilayah KPHP Dharmasraya dibuat untuk dapat diperbuatkan sebagaimana mestinya.

Sungai Dareh, 27 Februari 2019

Pimpinan Rapat,



**Drs. NOFDINAL YEFRI, M.Si**  
NIP. 19621110 199101 1 005

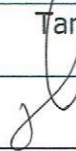


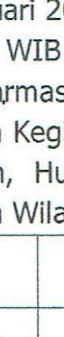

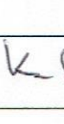

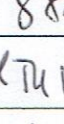
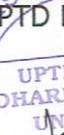
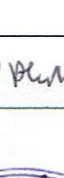
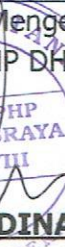
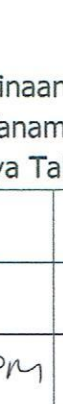
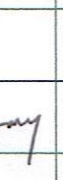

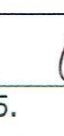


Daftar Hadir Peserta Rapat Persiapan Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan  
Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan  
Pada Wilayah KPHP Dharmasraya Tahun 2019

Hari / Tanggal : Rabu / 27 Februari 2019

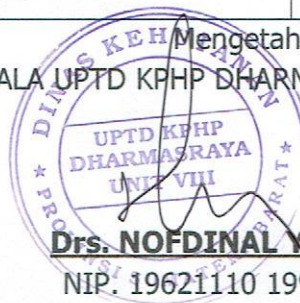
Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB

Tempat : UPTD KPHP Dharmasraya

Agenda : Rapat Persiapan Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan  
Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan  
Kehutanan Pada Wilayah KPHP Dharmasraya Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nofdinal Jefri	Pa KPHP	1. 
2.	Hakibullah	Kasi PKSDAE & PM	2. 
3.	Fetri Delta	Kasi PPH	3. 
4.		Kasubag	4. 
5.	Kharidat	Polhut	5. 
6.	ALAN DRISON	PR	6. 
7.	Nira Dewata N	staf	7. 
8.	HENDRI	PR. PENYELIA	8. 
9.	Hidayati Saldi	staf	9. 
10.	Bu Yang	Polhut	10. 
11.		STAF	11. 
12.	ZULBAINI	PR. Penyelia	12. 
13.	Syahwal Mukarom	staf	13. 
14.	EVI YUSRY	Kasub TU KPHP Dharmasraya	14. 
15.	Rudi Herman	staf	15. 

Mengetahui,  
KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA UNIT VIII,



**Drs. NOFDINAL YEFRI, M.Si**

NIP. 19621110 199101 1 005